e-ISSN: 2686-0643
p-ISSN: 2656-5161
doi: 10.35316/assidanah.v8i2.404-418
https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/assidanah
As-sidanah

PENGUATAN KAPASITAS IPNU-IPPNU DALAM PEMBANGUNAN POLITIK MENYUARAKAN ISU LINGKUNGAN

Siti Muslikhatul Ummah[1]*, Nugraheni Arumsari[2], Himmatul Ulya[3], M. Fikri Amrullah[4]
[1]*Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia
[2,3]Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia
[4]Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia
[1*]ummahmuslikhatul@mail.unnes.ac.id, [2]nugraheni.arum@mail.unnec.ac.id,
[3]himma.ulya@mail.unnec.ac.id, [4]m_fikri_amr@mail.unnes.ac.id

Abstract: *This article identifies key issues affecting the partner community, particularly tidal flooding and land submergence in Sayung District, Demak Regency. Two villages, Timbulsloko and Bedono, have experienced severe inundation and land submergence due to coastal abrasion. Community political participation can influence policymaking in addressing these flooding problems. However, political participation, as reflected in voter turnout during local elections, remains relatively low. This indicates political apathy toward prospective local government leaders, who have the authority to address tidal flooding issues. This article aims to raise public political awareness of how public policies can affect the environment in which communities live. Its novelty lies in contributing to the study of youth organizational political participation in addressing flooding problems in Sayung District, Demak Regency. This community service program involved IPNU and IPPNU, youth organizations actively engaged in the Sayung community. The program was implemented through political education seminars and Focus Group Discussions (FGDs) on community political participation. The findings imply the need to strengthen the organizational capacity of IPNU-IPPNU, enabling them to participate directly in political development processes and efforts to address the environmental challenges affecting their communities.*

Keywords: *Capacity Building; Environmental Issues; Political Development; Youth Organization.*

Copyright (c) 2026 Siti Muslikhatul Ummah, et al.

* Corresponding author: Siti Muslikhatul Ummah
Email Address: ummahmuslikhatul@mail.unnes.ac.id (Universitas Negeri Semarang, Semarang)
Received: April 26, 2026; Revised: October 30, 2026; Accepted: November 4, 2026; Published: November 10, 2026

PENDAHULUAN

Generasi muda menjadi salah satu pilar dalam demokrasi di Indonesia. Menilik sejarah, kemerdekaan Indonesia dipelopori oleh gerakan-gerakan dari para pemuda. Generasi muda memiliki ide-ide kreatif, dinamis, dan melek secara intelektual terhadap pengetahuan serta memiliki energi yang besar dalam pembangunan bangsa. Pemuda merupakan sumber daya manusia yang penting sebagai agen untuk perubahan sosial, pembangunan ekonomi, inovasi teknologi hingga

pada proses demokratisasi (Ramadani, 2023). Keberlangsungan suatu negara salah satunya ditentukan oleh pemikrian dan kontribusi positif dari para pemuda (Susanti, 2018).

Bonus demografi di Indonesia saat ini berdampak pada tingginya angkatan generasi muda yang diharapkan menjadi generasi emas di 2045. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemuda adalah seseorang yang berusia 16-30 tahun. Pada tahun 2022, generasi muda mencapai angka 65,82 juta jiwa dengan rentang usia 16-30. Persentase angka tersebut mencapai 24% dari keseluruhan penduduk di Indonesia (Nurhanisah, 2023). Jika jumlah tersebut dikategorikan dalam rentang usia 16-18 tahun (bangku SMA) sebesar 20,34%, usia 19-24 (bangku kuliah) mencapai 40,10%, dan usia 25-30 tahun (usia produktif) sebesar 39,56% (Nurhanisah, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa pemuda di dominasi oleh usia-usia kritis dan produkif dalam proses pembangunan bangsa. Jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2023 dengan jumlah generasi muda sebesar 64,16 juta jiwa (23,18%) (Rizaty, 2024). Walaupun mengalami penurunan namun angka tersebut masih tergolong cukup tinggi.

Bonus demografi tersebut dapat menimbulkan permasalahan sosial apabila generasi muda tidak memiliki tempat untuk mengekspresikan diri. Kenakalan remaja yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat seringkali terjadi. Di Semarang pada tahun 2024 marak kejadian kreak yang bahkan menyebabkan korban meninggal (Sulistiono, 2024; Prinada, 2024). Di Yogyakarta juga terjadi kejadian yang mirip dengan istilah klitih pada tahun 2023 (Dewantara, 2023). Kejadian-kejadian serupa kemungkinan juga banyak terjadi di daerah-daerah lain dengan istilah yang berbeda. Salah satu bentuk upaya untuk mengurangi permasalahan anak muda adalah dengan adanya kegiatan positif di organisasi kepemudaan.

Organisasi kepemudaan pada dasarnya adalah wadah berhimpun para pemuda untuk mengekspresikan diri karena adanya ikatan profesi, primordialisme, keagamaan dan lainnya (Saputra, 2017). Organisasi kepemudaan menjadi wadah bagi potensi-potensi pemuda untuk dapat disalurkan dan dikembangkan. Idealisme, sikap kritis, inovatif, dan semangat juang tinggi, serta solidaritas menjadi nilai positif yang dimiliki oleh pemuda (Darmawati et al., 2022). Banyak organisasi-organisasi kepemudaan baik di level desa hingga nasional, bahkan organisasi tersebut bertingkat yang dapat dijadikan sebagai media pendidikan politik. Selain karang taruna yang ada di desa-desa hingga nasional, organisasi kepemudaan lainnya yang dekat dengan masyarakat adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang ada di hampir setiap kecamatan.

IPNU-IPPNU merupakan salah satu organisasi di bawah naungan organisasi Islam di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU). IPNU merupakan organisasi untuk menghimpun pelajar NU berjenis kelamin laki-laki, sementara IPPNU untuk jenis kelamin perempuan. Organisasi ini

berfungsi sebagai tempat berkhidmat dan mempersiapkan kader-kader penerus dalam melaksanakan serta mengembangkan ajaran ahlus sunnah wal jama'ah. Selain itu tujuan organisasi ini adalah untuk menjalin dan memperkuat ukhuwah nahdliyah, Islamiyah, insaniyah, dan wathoniyah (Rofi1, 2011). Adanya semangat wathoniyah, menjadikan IPNU-IPPNU organisasi yang seharusnya mampu mendukung kemajuan bangsa. IPNU-IPPNU Kecamatan Sayung menjadi target mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini. Pemilihan mitra tersebut didasarkan pada pentingnya keterlibatan generasi muda sebagai aktor sosial yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam merespons berbagai persoalan di lingkungan sekitarnya.

Hal tersebut menjadi relevan mengingat persoalan banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif ekologis, geografis, dan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, sementara aspek partisipasi politik dan keterlibatan generasi muda dalam menyuarakan persoalan tersebut masih perlu mendapat perhatian. Kajian mengenai banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, selama ini lebih banyak berfokus pada aspek ekologis, geografis, dan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Khairullah et al., (2024) mengkaji luas genangan banjir rob yang dipengaruhi oleh kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah. Sementara itu, (Haloho & Purnaweni, 2020) menekankan strategi adaptasi masyarakat Desa Bedono dalam menghadapi dampak banjir rob. Kajian Salsabila et al., (2025) juga mengungkap persoalan ketahanan sosial masyarakat Desa Timbulsloko, khususnya terkait keterbatasan air bersih, beban ekonomi, dan ketimpangan distribusi bantuan sosial. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas permasalahan banjir rob, aspek partisipasi politik dan keterlibatan generasi muda dalam mendorong penyelesaian persoalan lingkungan melalui kebijakan publik masih belum banyak mendapatkan perhatian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kajian partisipasi politik generasi muda dengan isu lingkungan, khususnya melalui keterlibatan organisasi kepemudaan IPNU dan IPPNU di Kecamatan Sayung. Generasi muda tidak hanya diposisikan sebagai kelompok masyarakat yang terdampak bencana, tetapi juga sebagai aktor politik dan kekuatan masyarakat sipil yang memiliki potensi untuk mengartikulasikan aspirasi lingkungan, membangun kesadaran politik masyarakat, mengawal kebijakan pemerintah daerah, serta mendorong akuntabilitas dalam penanganan banjir rob. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif baru bahwa penyelesaian persoalan banjir rob tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis dan ekologis, tetapi juga penguatan partisipasi politik dan kapasitas organisasi kepemudaan dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.

Penguatan kapasitas organisasi perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran pentingnya peran organisasi dalam proses perubahan sosial di lingkungan masyarakat

Kecamatan Sayung dalam menghadapi banjir. Penguatan kapasitas adalah proses meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Haryanto, 2014). Penguatan kapasitas organisasi tidak lepas dari upaya pendidikan politik. Pendidikan politik adalah suatu bentuk proses pembelajaran kepada warga negara tentang nilai-nilai, norma, serta symbol-simbol politik melalui media pembelajaran baik di sekolah, instansi pemerintahan, partai politik maupun organisasi kemasyarakatan (Sukmawati & Rafni, 2020). Pendidikan politik umumnya dilaksanakan memberikan pengetahuan politik dengan tujuan memberikan *political awareness* bahwa sikap politik dan partisipasi dari setiap individu dapat memengaruhi kebijakan politik yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas politik generasi muda, khususnya anggota organisasi IPNU dan IPPNU di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, agar mampu berperan aktif dalam merespons permasalahan banjir rob melalui partisipasi politik dan keterlibatan dalam proses kebijakan publik. Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk membangun pemahaman generasi muda mengenai keterkaitan antara permasalahan lingkungan, kebijakan pemerintah daerah, dan partisipasi politik masyarakat; meningkatkan kemampuan organisasi kepemudaan dalam mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat terdampak banjir rob; serta mendorong peran IPNU–IPPNU sebagai aktor masyarakat sipil yang dapat berkontribusi dalam mengawal kebijakan publik dan mendorong penyelesaian permasalahan lingkungan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), yaitu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada identifikasi, pengembangan, dan optimalisasi aset serta potensi yang dimiliki komunitas. Pendekatan ABCD merupakan alternatif dari model pemberdayaan yang hanya berorientasi pada identifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya modal sosial, kapasitas lokal, jaringan kelembagaan, dan partisipasi warga sebagai sumber daya dalam mendorong pembangunan komunitas (Mathie & Cunningham, 2003). Dalam perspektif ABCD, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan potensi dan sumber daya komunitasnya (Nel, 2020).

Pada kegiatan ini, organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) diposisikan sebagai aset sosial dan kelembagaan yang memiliki potensi untuk mendorong partisipasi politik generasi muda dalam merespons permasalahan banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pengembangan aset komunitas melalui keterlibatan

organisasi lokal dapat memperkuat kapasitas kolektif, membangun inisiatif bersama, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi pada proses pembangunan (Mathie et al., 2017).

Pelaksanaan kegiatan mengadaptasi empat tahapan utama ABCD, yaitu *discovery, dream, design,* dan *destiny*. Pertama, tahap *discovery* (identifikasi aset), dilakukan melalui koordinasi dan diskusi dengan pengurus IPNU–IPPNU untuk mengidentifikasi potensi organisasi, kapasitas kepemudaan, jaringan sosial, serta pengalaman anggota dalam kegiatan kemasyarakatan. Tahap ini juga digunakan untuk menggali pemahaman peserta mengenai permasalahan banjir rob dan keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah. Identifikasi aset menjadi bagian penting dalam ABCD karena pengembangan komunitas perlu dimulai dengan mengenali keterampilan, kapasitas individu, kelembagaan lokal, dan sumber daya sosial yang tersedia (Kretzmann & McKnight, 1993).

Kedua, tahap *dream* (merumuskan harapan), dilakukan dengan membangun kesadaran dan menggali pandangan generasi muda mengenai kondisi lingkungan yang diharapkan, khususnya terkait penanganan banjir rob dan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik. Tahap ini berorientasi pada pengembangan visi kolektif berdasarkan potensi dan harapan komunitas.

Ketiga, tahap *design* (merancang pengembangan aset), dilaksanakan melalui seminar pendidikan politik dan Focus Group Discussion (FGD). Seminar memberikan penguatan literasi politik mengenai partisipasi politik, kebijakan publik, kewenangan pemerintah daerah, dan peran generasi muda dalam penyelesaian persoalan lingkungan. Selanjutnya, FGD menjadi ruang partisipatif bagi peserta untuk mengidentifikasi persoalan, menyampaikan aspirasi, serta mendiskusikan potensi organisasi kepemudaan dalam mengawal kebijakan publik terkait penanganan banjir rob. Tahap ini sejalan dengan prinsip ABCD yang mendorong pemanfaatan aset komunitas untuk membangun inisiatif dan tindakan kolektif (Mathie & Cunningham, 2003).

Keempat, tahap *destiny* (penguatan keberlanjutan), diarahkan pada refleksi dan evaluasi hasil kegiatan untuk mengidentifikasi peningkatan pemahaman serta potensi kontribusi organisasi IPNU–IPPNU dalam pembangunan politik dan kepedulian lingkungan. Penguatan kapasitas komunitas melalui pengembangan aset lokal diharapkan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dan masyarakat untuk membangun inisiatif kolektif secara berkelanjutan (Mathie et al., 2017).

Melalui pendekatan ABCD, kegiatan pengabdian ini berupaya mengoptimalkan keberadaan organisasi kepemudaan sebagai aset sosial masyarakat dalam membangun kesadaran politik dan mendorong keterlibatan generasi muda dalam persoalan lingkungan. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya ditempatkan sebagai kelompok yang terdampak banjir rob, tetapi juga sebagai aktor sosial dan politik yang memiliki potensi untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat serta

berkontribusi dalam mendorong kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan lingkungan.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Sayung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki karakteristik demografi dan sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh letaknya di pesisir utara Jawa, kawasan industri, serta persoalan lingkungan seperti banjir rob dan abrasi pantai. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Demak (2025) pada tahun 2024 jumlah penduduk sebesar 108.828 jiwa yang terdiri dari 55.304 (50,82%) laki-laki, dan 53.524 (49,18%) perempuan. Dengan luas wilayah sekitar 84,39 km², kepadatan penduduk Kecamatan Sayung mencapai sekitar 1.290 jiwa per km². Dengan luas wilayah sekitar 84,39 km², kepadatan penduduk Kecamatan Sayung mencapai sekitar 1.290 jiwa per km².

Struktur penduduk Kecamatan Sayung didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun), yaitu sekitar 75.675 jiwa atau 69,54% dari keseluruhan penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia yang cukup besar untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui keterlibatan generasi muda. Keberadaan organisasi kepemudaan dan keagamaan, seperti IPNUdan IPPNU, menjadi modal sosial strategis dalam membangun kesadaran kritis, literasi politik, dan partisipasi masyarakat.

Pada sisi lain, karakteristik wilayah pesisir Kecamatan Sayung menghadapi berbagai persoalan

lingkungan, terutama banjir rob, abrasi, dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian Asrofi et al., (2024) menunjukkan bahwa banjir rob di wilayah pesisir Sayung memberikan dampak langsung terhadap kesehatan fisik, pekerjaan, dan kepemilikan properti masyarakat. Dampak tersebut juga berimplikasi terhadap kondisi sosial ekonomi dan mobilitas penduduk. Sementara itu, Munasikhah & Wijayati, (2022) mengidentifikasi bahwa kerusakan ekosistem mangrove dan perubahan pemanfaatan lahan turut berkontribusi terhadap krisis ekologis, termasuk abrasi dan banjir rob di kawasan pesisir Sayung.

Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan generasi muda tidak hanya sebagai kelompok yang terdampak, tetapi juga sebagai aktor sosial yang mampu mengidentifikasi permasalahan, menyampaikan aspirasi, memahami kebijakan publik, serta berpartisipasi dalam mendorong penyelesaian persoalan lingkungan. Hal ini sejalan dengan temuan Lailiyah et al., (2020) bahwa penguatan literasi politik bagi generasi muda penting untuk membangun pemahaman dan sikap kritis dalam menyikapi informasi serta isu-isu politik. Selain itu, Putri et al., (2025) menekankan pentingnya penguatan literasi kebijakan dan pengalaman deliberatif agar generasi muda dapat terlibat secara lebih substantif dalam proses partisipasi publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas IPNU–IPPNU melalui pendidikan politik dan forum diskusi kelompok menjadi relevan sebagai upaya meningkatkan literasi politik, membangun kesadaran kritis, serta memperkuat peran pemuda dalam merespons persoalan lingkungan di Kecamatan Sayung.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian telah dilakukan pada Rabu, 30 Juli 2025 di Balaidesa Purwosari Kecamatan Sayung Demak. Kegiatan pengabdian dihadiri oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UNNES, PAC IPNU dan IPPNU Kecamatan Sayung. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan FGD berlangsung selama dua jam, mulai pukul 10.00-12.00 WIB. Adapun susunan acaranya mulai dari pembukaan, pemaparan materi 1, pemaparan materi 2, diskusi tanya jawab, penutup, dan dokumentasi. Dalam pembukaan diisi oleh sambutan dari Ketua Tim Pengabdian, Ketua PAC IPNU dan IPPNU. Ketua Tim Pengabdian menyampaikan maksud dari kegiatan pengabdian adalah sebagai salah satu upaya pembangunan politik kepada para pemuda dengan tujuan memberikan pemahaman akan pentingnya partisipasi dan kebebasan bersuara pemuda terhadap kondisi sosial lingkungan di masyarakat sekitar. Selanjutnya sambutan dari Ketua PAC IPNU dan IPPNU menyambut baik kegiatan pengabdian tersebut, karena mereka mendapatkan pendidikan politik yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya baik dari sekolah maupun masyarakat. Oleh karena itu mereka antusias untuk ikut dalam kegiatan FGD pengabdian ini. Namun dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada hari kerja, peserta yang datang tidak bisa maksimal karena banyak pengurus yang harus bekerja.



Gambar 2. Sambutan oleh Ketua Tim Pengabdian dan Ketua PAC IPNU-IPPNU Kec. Sayung

Acara selanjutnya adalah pemaparan materi pertama oleh Ketua Tim Pengabdian dengan tema "Pembangunan Politik melalui Kebebasan Bersuara". Materi yang disampaikan mencakup konsep politik dan sistem politik, pembangunan politik melalui partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong berjalannya sistem politik yang demokratis, serta kebebasan bersuara sebagai salah satu wujud partisipasi politik masyarakat. Verba (1967) menjelaskan bahwa partisipasi demokratis mencakup berbagai tindakan warga negara yang ditujukan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, partisipasi politik tidak terbatas pada keterlibatan masyarakat dalam pemilu, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas untuk menyampaikan kepentingan dan memengaruhi kebijakan publik.

Pemateri menjelaskan bahwa kebebasan bersuara dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, antara lain kebebasan berekspresi melalui seni, penyampaian pendapat melalui aksi atau demonstrasi, penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi dan penyebaran aspirasi, dialog dengan pemerintah, hingga penggunaan hak pilih dalam pemilu. Secara konstitusional, kebebasan tersebut dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta mencari dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran. Selain itu, penyampaian pendapat di muka umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pemateri juga menegaskan bahwa penggunaan hak pilih dalam pemilu merupakan salah satu bentuk dasar atau minimal partisipasi politik yang dapat dilakukan masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi lainnya, seperti

menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan pemerintah, membangun diskusi publik, menyampaikan aspirasi kepada pemangku kebijakan, serta mengorganisasi gerakan sosial untuk merespons persoalan yang dihadapi. Verba et al., (1993) menunjukkan bahwa warga negara memiliki beragam saluran untuk menyampaikan pengaruh politik kepada para pembuat kebijakan, termasuk melalui aktivitas di luar pemungutan suara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kebebasan bersuara diharapkan dapat mendorong peserta, khususnya kader IPNU–IPPNU, untuk tidak hanya menjadi pemilih dalam proses demokrasi elektoral, tetapi juga menjadi warga negara yang kritis, aktif, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 3. Pemaparan Materi Pembangunan Politik melalui Kebebasan Bersuara

Materi berikutnya disampaikan oleh tim pengabdian yang merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dengan tema "Peran Pemuda dalam Menyuarakan Isu Lingkungan". Dalam paparannya, pemateri menjelaskan berbagai bentuk peran yang dapat dilakukan pemuda dalam merespons persoalan lingkungan, antara lain memberikan edukasi dan melakukan kampanye melalui media sosial, melaksanakan aksi nyata melalui kegiatan pelestarian lingkungan, melakukan advokasi kepada lingkungan pertemanan dan masyarakat mengenai pentingnya kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, serta membangun kolaborasi dengan komunitas, organisasi, dan pemangku kepentingan untuk mendorong perubahan kebijakan terkait lingkungan. Peran tersebut sejalan dengan pandangan Rouyer et al. (2026) yang menjelaskan bahwa jejaring pemuda dapat menjadi aktor penghubung dalam tata kelola lingkungan, khususnya dengan mempertemukan gerakan masyarakat akar rumput dan para pengambil kebijakan.

Salah satu bentuk partisipasi yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini adalah melalui *social digital movement*, yaitu gerakan sosial yang memanfaatkan media digital untuk menyebarluaskan informasi, membangun kesadaran publik, menggalang dukungan, dan mendorong aksi kolektif. Baran dan Stoltenberg (2023) menunjukkan bahwa media digital telah menjadi ruang penting bagi perkembangan aktivisme lingkungan dan iklim, termasuk dalam

mobilisasi gerakan anak muda. Penelitian Andini (2025) juga mengungkapkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang aktivisme digital bagi generasi muda untuk menyuarakan persoalan lingkungan sekaligus membentuk kesadaran dan preferensi politik. Dengan demikian, kampanye isu lingkungan melalui media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen advokasi publik yang menghubungkan kesadaran digital dengan tindakan nyata di masyarakat. Hal ini menjadi penting bagi kader IPNU–IPPNU di Kecamatan Sayung agar mampu memanfaatkan media digital untuk menyuarakan persoalan lingkungan di wilayahnya, seperti banjir rob dan abrasi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi yang berkelanjutan.



Gambar 4. Pemaparan Materi Peran Pemuda dalam Menyuarakan Isu Lingkungan

Setelah seluruh rangkaian pemaparan materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan peserta. Sesi ini berlangsung interaktif dengan sejumlah isu yang disampaikan oleh Ketua IPNU, Ketua IPPNU, dan peserta lainnya. Ketua IPNU mengangkat persoalan mengenai peran pemuda dalam pembangunan daerah, terutama ketika sebagian pemuda memilih merantau atau memiliki kesibukan masing-masing sehingga keterlibatan mereka dalam lingkungan asal tampak terbatas. Menanggapi hal tersebut, pemateri menjelaskan bahwa kontribusi pemuda tidak selalu harus diwujudkan melalui kehadiran fisik atau keterlibatan langsung dalam kegiatan di daerah asal. Pemuda yang merantau tetap dapat berkontribusi melalui jejaring sosial, pertukaran pengetahuan, dukungan terhadap komunitas, maupun kegiatan sosial di lingkungan tempat mereka berada. Perspektif ini sejalan dengan kajian Deane et al., (2025) yang menekankan pentingnya menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan menyesuaikan mekanisme keterlibatan sipil dengan kondisi serta pengalaman beragam kelompok anak muda. Dengan demikian, kesibukan dan mobilitas pemuda tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai ketiadaan kepedulian, melainkan

perlu dilihat dari beragam bentuk kontribusi yang dapat mereka lakukan.

Pertanyaan berikutnya disampaikan oleh Ketua IPPNU mengenai kewajiban pembayaran pajak atas lahan yang terdampak banjir rob dan tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal, sementara masyarakat tetap dibebani kewajiban perpajakan. Isu tersebut memunculkan diskusi mengenai keadilan kebijakan publik, khususnya bagaimana pemerintah mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat yang terdampak bencana dan perubahan lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan. Persoalan ini dapat dibaca melalui perspektif keadilan lingkungan (*environmental justice*), yang tidak hanya menekankan distribusi dampak lingkungan, tetapi juga keadilan dalam proses pengambilan keputusan dan pengakuan terhadap kelompok masyarakat yang paling terdampak (Schlosberg, 2007). Dalam konteks tersebut, masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, meminta penjelasan mengenai kebijakan yang berlaku, serta mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dirasakan belum mempertimbangkan kondisi sosial dan ekologis masyarakat pesisir.

Diskusi lainnya berkaitan dengan kebebasan berekspresi, khususnya mengenai pengibaran bendera bergambar karakter anime One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan yang diberitakan mendapat intimidasi. Isu ini menjadi pintu masuk untuk membahas batasan dan perlindungan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *General Comment No. 34* (2011) menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi mencakup penyampaian gagasan melalui berbagai bentuk, termasuk simbol, gambar, karya seni, spanduk, dan media digital. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap dapat dikenai pembatasan apabila memenuhi persyaratan hukum, tujuan yang sah, kebutuhan, dan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, pembahasan mengenai penggunaan simbol dalam ruang publik perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak berekspresi sekaligus penghormatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Berbagai pertanyaan dan tanggapan dalam sesi diskusi tersebut menunjukkan antusiasme peserta, khususnya kader IPNU–IPPNU, dalam mengidentifikasi dan menyuarakan persoalan yang mereka temui dalam kehidupan masyarakat. Respons terhadap pertanyaan disampaikan oleh pemateri dan dosen tim pengabdian melalui penjelasan konseptual serta pengaitan isu dengan prinsip partisipasi politik, keadilan kebijakan, dan hak-hak warga negara. Sesi ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai pemilu dan lembaga politik, tetapi juga mencakup kemampuan warga untuk membaca persoalan publik, mengajukan pertanyaan kritis, menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam proses penyelesaian masalah. Hal tersebut sejalan dengan Steel et al., (2026), yang menegaskan bahwa keterlibatan bermakna generasi muda dalam pengambilan keputusan lingkungan merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata

kelola lingkungan yang inklusif dan berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, forum diskusi menjadi salah satu ruang pembelajaran partisipatif yang dapat memperkuat literasi politik sekaligus menumbuhkan kesadaran kader IPNU–IPPNU untuk berperan aktif dalam merespons persoalan sosial dan lingkungan di Kecamatan Sayung.



Gambar 4. Diskusi Peserta dengan Tim Pengabdian

Kegiatan pengabdian berhasil dilaksanakan dengan melibatkan 15 peserta kader IPNU–IPPNU dan didukung oleh 5 orang tim pengabdian. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pemaparan dua materi hingga diskusi dan tanya jawab, terlaksana dengan baik. Peserta menunjukkan antusiasme melalui penyampaian pertanyaan dan pendapat mengenai persoalan pembangunan daerah, kebijakan perpajakan atas lahan terdampak rob, serta kebebasan berekspresi. Diskusi juga berhasil mengidentifikasi tiga persoalan utama lingkungan di Kecamatan Sayung, yaitu banjir rob, abrasi, dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai bentuk keterlibatan pemuda melalui edukasi, advokasi, aksi pelestarian lingkungan, dan kampanye digital. Di ujung acara, kegiatan FGD ditutup dengan penandatangan *Implementation of Agreement* (IA) yang menunjukkan adanya kerjasama antara Prodi Ilmu Politik FISIP Unnes dan IPNU-IPPNU Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Setelahnya kegiatan diakhiri dengan foto bersama dan ramah tamah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung dengan lancar dan memperoleh respons positif dari peserta yang berasal dari pengurus PAC IPNU–IPPNU Kecamatan Sayung. Kegiatan ini telah mencapai tujuan utama, yaitu memberikan pendidikan politik kepada generasi muda melalui penguatan pemahaman mengenai hak-hak politik, kebebasan berekspresi, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Pencapaian tersebut terlihat dari antusiasme peserta selama pemaparan materi oleh dua narasumber serta keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai persoalan yang disampaikan peserta menunjukkan adanya kesadaran untuk menghubungkan pengetahuan politik dengan kondisi sosial dan lingkungan yang mereka hadapi. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mendorong generasi muda agar lebih kritis, responsif, dan berani menyuarakan aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Meskipun kegiatan telah terlaksana dengan baik, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Kegiatan ini hanya melibatkan 15 peserta dari pengurus PAC IPNU–IPPNU Kecamatan Sayung sehingga jangkauan pendidikan politik belum mencakup kelompok pemuda yang lebih luas. Selain itu, pelaksanaan kegiatan masih berfokus pada penyampaian materi dan diskusi, sehingga belum mencakup praktik langsung dalam melakukan advokasi maupun kampanye isu lingkungan. Kegiatan ini juga belum dilengkapi dengan pengukuran *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui secara kuantitatif peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pendidikan politik. Oleh karena itu, dampak kegiatan terhadap perubahan pengetahuan dan perilaku partisipasi politik peserta belum dapat diukur secara menyeluruh.

Kegiatan pengabdian berikutnya disarankan untuk memperluas sasaran peserta dengan melibatkan lebih banyak organisasi kepemudaan dan kelompok masyarakat di Kecamatan Sayung agar pendidikan politik dapat menjangkau generasi muda secara lebih luas. Materi kegiatan juga perlu dikembangkan dengan menitikberatkan pada praktik advokasi kebijakan publik, strategi menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana *social digital movement* untuk menyuarakan persoalan lingkungan, khususnya banjir rob dan abrasi. Selain itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya melalui kegiatan nyata di masyarakat. Evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* serta pemantauan tindak lanjut kegiatan juga direkomendasikan untuk mengukur peningkatan literasi politik dan keberlanjutan partisipasi pemuda dalam merespons persoalan sosial dan lingkungan di wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asrofi, A., Giyarsih, S. R., & Hadmoko, D. S. 2024. The Impact Of Tidal Floods On Poor

Households In The Sayung Coast, Demak Regency, Indonesia. *Indonesian Journal of Geography*. https://doi.org/10.22146/ijg.94063

Darmawati, D., Mahfuddin, M., & Syamjaya, S. S. 2022. Peran Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan Desa. *Journal I La Galigo : Public Administration Journal*.

Deane, K. L., Fenaughty, J., Bullen, P., Ahmad, M., Chuah, Y., Tang-Taylor, J., Joseph, D., & Marlowe, J. 2025. Innovating to amplify the voices of young people from marginalized ethnic migrant backgrounds. *American Journal of Community Psychology*. https://doi.org/10.1002/ajcp.12779

Dewantara, Jalu Rahman. 2023. Klitih di Jogja terjadi lagi, Pelaku Sabet Korban Pakai Senjata Tajam. DetikNews.com. online: https://news.detik.com/berita/d-6959320/klitih di-jogja-terjadi-lagi-pelaku-sabet-korban-pakai-senjata-tajam

Haloho, E. H., & Purnaweni, H. 2020. Adaptasi Masyarakat Desa Bedono terhadap Banjir Rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. *Journal of Management and Public Policy*.

Haryanto. 2014. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan. Jakarta: AP2I Press.

Human Rights Committee. 2011. General comment No. 34: Article 19, freedoms of opinion and expression (CCPR/C/GC/34). United Nations. https://www.ohchr.org/sites/default/files/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf

Khairullah, K. K., Rifai, A., & Indrayanti, E. 2024. Studi Luasan Genangan Banjir Rob Akibat Kenaikan Muka Air Laut dan Penurunan Muka Tanah di Kecamatan Sayung, Demak. *Indonesian Journal of Oceanography*. https://doi.org/10.14710/ijoce.v6i4.19468

Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. 1993. Introduction to "Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets," by John P. Kretzmann and John L. McKnight. *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*.

Lailiyah, N., Pradhana, G. A., & Yuliyanto, M. 2020. Youthizen Political Literacy: Educating The Generation Z. *Jurnal Ilmu Sosial*. https://doi.org/10.14710/jis.1.1.2020.22-39

Mathie, A., Cameron, J., & Gibson, K. 2017. Asset-based and Citizen-led Development: Using a Diffracted Power Lens to Analyze the Possibilities and Challenges. *Progress in Development Studies*. https://doi.org/10.1177/1464993416674302

Mathie, A., & Cunningham, G. 2003. From Clients to Citizens: Asset-based Community Development as a Strategy for Community-driven Development. *Development in Practice*. https://doi.org/10.1080/0961452032000125857

Munasikhah, S., & Wijayati, P. A. 2022. Dari Hutan Mangrove menjadi Tambak : Krisis Ekologis di Kawasan Sayung Kabupaten Demak 1990-1999. *Journal of Indonesian History*.

Nel, H. (2020). Stakeholder Engagement: Asset-Based Community-Led Development (ABCD) Versus the Traditional Needs-Based Approach to Community Development. *Social Work (South Africa)*. https://doi.org/10.15270/56-4-857

Nurhanisah, Yuni. 2023. Pemuda Dominasi Penduduk Indonesia. Indonesiabaik.id. online: https://indonesiabaik.id/infografis/pemuda-dominasi-penduduk indonesia#:~:text=Pemuda%20di%20Indonesia,tahun%20atau%20disebut%20sebagai %20pemuda

Prinada, Yuda. 2024. Arti Kreak Semarang dan Fakta-fakta Tawuran hingga Lukai Pemotor. Tirto.id. online: https://tirto.id/arti-kreak-semarang-dan-fakta-fakta-tawuran hingga-lukai-

pemotor-g34a

Putri, R. A., Marlina, M., & Zain, D. 2025. Reimagining Public Policy and Legal Education for Youth Civic Engagement in Indonesia: Bridging Structural Capacity Gaps. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*. https://doi.org/10.23960/administratio.v16i2.533

Ramadani, A. D. (2023). Statistik Pemuda Indonesia 2023. In *Badan Pusat Statistik*.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J.

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Rizaty, Monavia Ayu. 2024. Data Jumlah Pemuda di Indonesia pada 2023. DataIndonesia.id. online: https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-pemuda-di indonesia-pada-2023

Salsabila, F. N. J., Saputra, J. E., Tari, F. T., Tari, F. T., Sari, S. F., Shoffa, A. G., Heriyanti, A. P., & Fariz, T. R. 2025. Adaptasi Mandiri dan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Banjir Rob: Studi Kasus Desa Timbulsloko. *Proceeding Seminar Nasional IPA*, 688–698. https://proceeding.unnes.ac.id/snipa/article/view/4497

Saputra, I. 2017. Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Nusantara Di Kalangan Pemuda Indonesia. *Civic-Culture "Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya"*.

Schlosberg, D. 2007. Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. In *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199286294.001.0001

Steel, J., Kerr, S., B. Leakey, C. D., Snow, B., & Alexander, K. A. 2026. The "Where, Who, Why" of Youth Engagement in Environmental Decision-Making: a Scoping Review. *Sustainable Earth Reviews*. https://doi.org/10.1186/s42055-026-00127-3

Sukmawati, A., & Rafni, A. 2020. Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemuda di Kota Padang. *Journal of Civic Education*. https://doi.org/10.24036/jce.v3i2.349

Sulistiono. 2024. Semarang Darurat Kreak, Mahasiswa Udinus Asal Jepara Diduga jadi Korban Salah Sasaran Tewas Dibacok di Depan SPBU Kelud Raya. Jawa Pos radasemarang.id. online: https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/725096417/semarang-darurat-kreak mahasiswa-udinus-asal-jepara-diduga-jadi-korban-salahsasaran-tewas-dibacok-di depan-spbu-kelud-raya?page=2

Susanti, Herni. 2018. Generasi Muda Masa Depan Bangsa. Dinas Perumahan, Kawanasan Pemukiman dan Pertanahan. online: https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/generasi-muda-masa depan-bangsa-38

Verba, S. 1967. Democratic Participation. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 373(1), 53–78. https://doi.org/10.1177/000271626737300103

Verba, S., Schlozman, K. L., Brady, H., & Nie, N. H. 1993. Citizen Activity: Who Participates? What Do They Say? *American Political Science Review*. https://doi.org/10.2307/2939042